**TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN ABORSI PADA UNDANG – UNDANG NOMOR
36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DIKAITKAN
DENGAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA**

Oleh : Annisya Rani Putri

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing 2 : Widia Edorita, SH., MH

Alamat: Jl. Sambu Nomor 13, Kec. Pekanbaru Kota

Email : Annisyarp15@gmail.com– Telepon: 082283379696

ABSTRACT

Medically, abortion is to stop and expend pregnancy outcomes from the womb before the fetus can live beyond the content. Talk about abortion is closely related to the protection of Human Rights because a woman has the right to her body and herself and is entitled to live reproduction life safely, But on the other hand, the fetus in the womb is also entitled to live and thrive. These two things are indeed conflicting because it involves two lives. The purpose of writing this thesis, namely; First, the applicable provisions in the implementation of the provisions of abortion in Act No. 39 of 2009 About Health with Act No. 39 of 1999 About Human Rights; Second, the provision of abortion in Health Law is contrary to Human Rights.

This type of research is classified in normative law research. Because in this study the authors conducted legal research literature. Source of data used are primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this study using the method of assessment literature or documentary studies.

From the research there are three main issues that can be inferred. First, Abortion in legal concepts relates to the values of morality that make abortion not merely contrary to the positive law of the state, but also against ethical and moral values, abortion may be made against women with medical indications. Secondly, although abortion is permissible for rape victims it is not justified to have an abortion because it has bypassed the highest constitution of our country. Therefore for the rape victim should duly protect the weaker soul (in case of no medical indication to the victim). Suggestion, Author, First, For the victims of rape is given understanding and advice that the fetus is in the womb is a gift from God Almighty, refused his gift, not grateful pleasure is an act that is disliked by Allah SWT and is a great sin, Second, Cooperation and government support to rape victims to ensure their welfare, Third, Need to be expected in daily interaction, society to not directly hostile to women who are pregnant outside of marriage.

Keywords: *the provision of abortion- contravention-human rights*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya pembangunan nasional dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan empat fungsi negara seperti yang tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial¹. Negara menempatkan perempuan sebagai objek sekaligus subyek pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Kualitas perempuan dan kemandirian organisasi perempuan pun diusahakan untuk ditingkatkan dengan tetap mempertahankan nilai kesatuan dan persatuan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia seutuhnya di Indonesia itu berwawasan keadilan. Secara umum dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kaum perempuan di Indonesia, sehingga tidak mudah terjerumus kedalam tindakan-tindakan yang dikategorikan melanggar norma-norma sosial, khususnya norma hukum dan hak asasi manusia².

Dalam Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak dengan pria dan menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan deklarasi tersebut.³ Dan selama ini, hak asasi manusia sering disebut hak kodrat, hak dasar manusia, hak mutlak, atau dalam Bahasa Inggris disebut *natural rights*,

human rights dan *fundamental rights*, sedangkan dalam Bahasa Belanda dikenal *Ground Rechten*, *Mensen Rechten*, *Rechten van den mens*. Istilah-istilah tersebut menunjuk pegakuan adanya hak asasi manusia.⁴

Keadilan dalam hak asasi tersebut sama sekali tidak didapat oleh korban pemerkosaan. Disebutkan juga unsur ketiga dalam Piagam Hak Asasi Manusia yang diberikan oleh Islam adalah kesucian seorang wanita harus dilindungi setiap saat, baik apabila ia sebangsa dengan kita atau dengan musuh, baik yang kita temukan dalam hutan belantara atau disebuah kota yang ditahluukkan, baik baik ia seagama dengan kita atau penganut agama lain atau sama sekali ia tidak beagama.⁵

Dalam hal ini jika aborsi dilarang dengan keras, kaum perempuan sering dijadikan korban. Secara biologis, hanya perempuan yang mengandung, melahirkan, menyusui. Pada “tugas-tugas biologis” ini kerap ditambah dengan pendidikan anak. Semua beban ini secara berat sebelah mengenai si ibu, sedangkan laki-laki yang menghamilinya luput dari semua beban itu.⁶

Ditinjau kembali dari perspektif HAM, seorang wanita mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan aborsi karena merupakan bagian dari hak kesehatan reproduksi yang sangat mendasar. Tapi dalam beberapa alasan tertentu aborsi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan bagi wanita yang tidak dapat menghindari kehamilannya, jika dilihat dari sudut pandang hak seorang wanita. Namun bagaimana dengan janin yang ada didalam kandungan? Bukankah janin itu juga punya hak untuk hidup?.

¹Suryono Ekotama, *et. al.*, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2000, hlm.3.

² *ibid*, hlm.8.

³Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia, *Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 5.

⁴ H.A. Mansyur Effendi, *HAM Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Malang, 1993, hlm. 15

⁵ Maulana Abdul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm.14.

⁶ K.Bertens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, PT.Grasindo, Jakarta, 2002, hlm.62.

Aborsi dilarang namun terdapat pengecualian bahwa aborsi dibolehkan dengan beberapa alasan salah satunya demi keselamatan nyawa ibu dan janin. Walaupun terdapat pengecualian terhadap aborsi itu tapi tetap haram hukumnya melakukan aborsi. Dapat diketahui bahwa aborsi itu sama dengan pembunuhan terhadap anak, sehingga terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia yaitu mengenai hak untuk hidup, serta hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, dalam hal ini adalah hak ibu, maka penulis tertarik mengangkat masalah ini dalam sebuah skripsi dengan judul *“Tinjauan Yuridis Ketentuan Aborsi Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia”*.

B. Rumusan Masalah

1. Ketentuan manakah yang berlaku dalam hal pelaksanaan ketentuan aborsi pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia?
2. Apakah ketentuan aborsi pada Undang-Undang kesehatan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan yang berlaku dalam hal pelaksanaan ketentuan aborsi pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui ketentuan aborsi pada Undang-Undang Kesehatan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia .

2) Kegunaan Penelitian

1. Untuk memberikan sumbangan pikiran kepada pembaca yang ingin mengetahui ketentuan manakah

yang berlaku dalam pelaksanaan aborsi jika dikaitkan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia;

2. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada penulis mengenai mengenai ketentuan manakah yang berlaku dalam hal pelaksanaan ketentuan aborsi jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia;; dan
3. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum menurut L.M Ghandi bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum.

Sebagai lawan kata dari harmoni adalah “disharmoni” dan istilah ini juga sering digunakan dalam bidang hukum untuk menunjukkan terjadinya tumpang tindih, saling bertentangan atau ketidakserasian antara peraturan perundang-undangan. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan memiliki maksud agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi, saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detil dan operasional materi muatannya. Tujuan dari adanya sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif.⁷

⁷

<http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/wawasan/article/download/64/46>, diakses, tanggal, 9 november 2016

Rudolf Stammler mengemukakan konsep, prinsip-prinsip hukum yang adil mencakup harmonisasi antara maksud dan tujuan serta kepentingan perorangan, dan maksud dan tujuan serta kepentingan umum.⁸

Dari pemahaman dan pengertian diatas, harmonisasi hukum dalam tulisan ini, diartikan sebagai upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan diantara norma-norma hukum didalam peraturan perundang-undangan sebagai subsistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional.⁹

2. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Pengertian Hak Asasi Manusia atau disingkat HAM yang ditemukan oleh Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB adalah hak-hak yang melekat pada manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.¹⁰

HAM itu sendiri dipertegas lewat *Declaration of Independence* 1788, yang dasarnya pengakuan persamaan manusia dimana Tuhan telah menciptakan manusia dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dirampas, antara lain hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak untuk mengejar kebahagiaan. Pengakuan HAM dipertegas lagi oleh Presiden F. D. Roosevelt yang diucapkan pada tahun 1941, yaitu:¹¹

1. Kebebasan berbicara (*freedom to speech*);
2. Kebebasan beragama (*freedom to religion*);
3. Kebebasan dari kemiskinan (*freedom from want*);

⁸Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2013, hlm. 329.

⁹ *ibid*, hlm. 331.

¹⁰Moh. Zaid, *Agama dan HAM Dalam Kasus di Indonesia*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta, 2007, hlm. 9.

¹¹ H.A. Mansyur Effendi, *Opcit*, hlm. 31.

4. Kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*).

Sebelum diamandemen, sesungguhnya UUD 1945 telah mengatur jaminan dan perlindungan HAM. Namun sayangnya, jaminan HAM dalam UUD 1945 belum memadai perlindungan dan jaminan HAM dalam UUD 1945.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama dalam melakukan penelitian hukum ini.¹³ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mencakup: Penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, sejarah hukum.

Dalam hal ini penulis akan memakai penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal antara Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 39 tahun 2009 Tentang Kesehatan, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sampai mana sinkronisasi antara Undang- undang Hak Asasi Manusia dengan Undang- undang Kesehatan, apakah ada pertentangan antara kedua Undang- undang tersebut?.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data

¹² Erdianto Effendi, "Pengujian Perundang-undangan Hukum Pidana oleh Mahkamah Konstitusi dalam Kaitan dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia", Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. II, No. 2 November 2009, hlm . 52.

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm. 14.

sekunder. Dalam metodologi penelitian hukum data sekunder dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi objek penelitian, yakni:

1. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari doktrin atau pendapat para ahli yang terdapat dalam buku-buku literatur serta berbagai tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya seperti kamus, internet, jurnal dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan, yaitu meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik dalam penelitian ini seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, pendapat para sarjana dan bahan-bahan penunjang lainnya yang relevan dengan penelitian.

3. Analisis Data

Setelah data diperoleh kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah, seterusnya diolah kemudian disajikan dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami atau dimengerti, kemudian data dianalisis dengan cara kualitatif, dengan cara dibandingkan atau diterapkan kedalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para sarjana

serta teori-teori hukum lainnya. Kualitatif menurut *Kirk* dan *Miller* pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang di pertentangkan dengan pengamatan kualitatif. Maka penelitian kualitatif tampaknya diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.¹⁴ Akhir dari pembahasan penelitian ini akan ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang diawali oleh hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus serta mendapatkan kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana fakta tersebut dijabatani oleh teori-teori.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan yang Berlaku Dalam Hal Pelaksanaan Ketentuan Aborsi Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Abortus adalah berakhirnya kehamilan sebelum janin dapat hidup didunia luar, tanpa mempersoalkan penyebabnya. Aborsi merupakan tindakan di mana seorang perempuan atas kehendaknya menggugurkan bayi yang berada didalam kandungannya.¹⁵

Abortus dapat dibagi kedalam dua golongan yaitu. *Abortus provocatus* adalah istilah latin yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum. Maksudnya adalah dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang perempuan hamil. Karena itu, *abortus provocatus* harus dibedakan dengan *abortus spontaneous*, dimana kandungan seorang perempuan hamil dengan spontan gugur terjadi tanpa tindakan mekanis dan disebabkan oleh faktor-faktor alamiah.. Jadi, perlu dibedakan

¹⁴Abdurrahman dan Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 1999, hlm. 26.

¹⁵ Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Op. cit.* hlm 106.

antara “abortus yang disengaja” dan “abortus spontan”.¹⁶

abortus provocatus dikenal di Indonesia dengan aborsi berasal dari Bahasa lain yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan. *Abortus provocatus* merupakan salah satu dari berbagai macam jenis abortus.

Abortus provocatus itu adalah pengguguran kandungan dengan secara sengaja yang artinya menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja (dalam hal ini adalah janin itu sendiri). *Abortus provocatus* ini terbagi menjadi 2 yaitu

1. *abortus provocatus medicinalis* yaitu pengakhiran kehamilan sebelum saatnya janin mampu hidup dengan maksud melindungi kesehatan ibu. Aborsi ini boleh dilakukan pada kehamilan akibat perkosaan atau akibat hubungan saudara (*incest*). Sehingga aborsi menjadi satu-satunya cara mempertahankan jiwa sang ibu; dalam keadaan tidak mungkin bisa mengupayakan kehidupan sang ibu dan janinnya bersama-sama. Dalam keadaan seperti inilah mengharuskan para medis spesialis kebidanan mengedepankan nyawa ibu daripada janinnya. Memang nyawa janin sama dengan nyawa sang ibu dalam kesucian dan penjagaannya, namun bila tidak mungkin menjaga keduanya kecuali dengan kematian salah satunya maka hal ini masuk dalam kaedah “Melanggar yang lebih ringan dari dua madharat untuk menolak yang lebih berat lagi” (Irtikâbul khaffi ad-Dhararain Lidaf’iA’lahuma).¹⁷

2. *abortus provocatus criminalis* yaitu aborsi yang dilakukan dengan melanggar hukum. Menghilangkan nyawa dengan sengaja itu termasuk kedalam pelanggaran terhadap hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup serta kejahatan terhadap nyawa.

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut

pembunuhan yang termasuk didalamnya pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan.¹⁸ Objek kejahatan ini adalah kandungan, yang dapat berupa sudah berbentuk makhluk yakni manusia, berkaki dan bertangan serta berkepala (*voldraggen vrucht*) dan juga belum berbentuk manusia (*onvoldragen vrucht*).

Banyak alasan mengapa wanita hamil melakukan aborsi. Diantara alasan tersebut adalah karena tidak ingin memiliki anak, tidak memiliki cukup uang untuk merawat, atau karena tidak ingin memiliki anak tanpa ayah. Alasan lain, seperti usia yang masih terlalu muda (terutama mereka yang hamil diluar nikah), aib keluarga, atau sudah memiliki banyak anak. Data studi dari Aida Torres dan Jacqueline Sarroch Forrest (1998) menunjukkan bahwa 93% kasus aborsi dilakukan karena alasan-alasan yang sifatnya untuk kepentingan pribadi. Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) mengkualifikasikan perbuatan aborsi tanpa alasan medis (*provocatus criminalis*) sebagai kejahatan terhadap nyawa.¹⁹

Dewasa ini, hampir setiap hari gencar didengung-dengungkan agar kita menghormati hak asasi. Bahkan, kini semakin disadari bahwa kejahatan yang paling mengerikan adalah kejahatan melawan hak asasi manusia, kejahatan melawan kemanusiaan (*crime against humanity*).²⁰

Apabila orang membicarakan tentang hak asasi manusia, tentu saja mengenai hak asasi manusia yang hidup, sebab orang yang mati tidak punya hak asasi lagi.

Segala pembicaraan mengenai hak asasi manusia misalnya, hak untuk berbicara dan mengekspresikan pendapat, hak untuk memilih agama, hak untuk merasa aman, hak untuk memilih pemimpin dan sebagainya, dibicarakan dalam kerangka dan demi manusia yang hidup. Bahkan ada yang menyatakan

¹⁸ Adami chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo, Jakarta: 2001, hlm. 56.

¹⁹ <http://murtini-tini.blog.ugm.ac.id/2011/10/26/aborsi-dan-ham/>, diakses, Tanggal, 22 Maret 2017.

²⁰ CB. Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, PT Grasindo, Jakarta: 2002, hlm. 141.

¹⁶ K. Bertens, *Op. cit.* hlm. 1.

¹⁷ <https://almanhaj.or.id/3362-islam-dan-aborsi-satu-tinjaun-hukum-fikih.html>, diakses, Tanggal, 24 Maret 2017.

manusia berhak untuk mati atas kehendak sendiri (*euthanasia*). Akan tetapi bagaimana pun juga, hak untuk mati ini hanya dipunyai oleh manusia yang hidup. Maka "hak untuk hidup" menjadi syarat utama dan mendasar ketika membicarakan mengenai hak asasi manusia.²¹

Hidup adalah syarat *sine qua non* (syarat mutlak) untuk mewujudkan dan mengembangkan seluruh potensi, aspirasi dan mimpi-mimpi seorang manusia. Hidup adalah syarat dasar untuk memperkembangkan diri menjadi individu dan pribadi sehingga menjadi dewasa. Konstitusi tertinggi negara kita yaitu Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28A yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya. Serta Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 53 ayat 1 menyatakan bahwa setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Anak yang ada dalam kandungan yang dimaksud adalah janin yang nantinya akan tumbuh menjadi anak dan berkembang selayaknya manusia. Janin merupakan awal kehidupan yang harus dihormati oleh setiap manusia dan dijaga karena janin nantinya akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang kelak juga akan menghasilkan hal yang sama. Jadi berapapun usia janin, berapapun yang dikatakan usia awal kehidupan janin, janin harus tetap dipertahankan hidup sepanjang tidak membahayakan kondisi ibu dan memang dapat terlahir ke dunia tanpa mengancam nyawa ibu dan janin.²²

Menggugurkan kandungan berarti "mengakhiri hidup janin dalam tubuhnya sendiri", ibu sebenarnya membunuh sesuatu yang ada dalam hatinya yaitu sikap keibuan. Permasalahan ini sangat kompleks jika dibicarakan karena menyangkut dua kehidupan yaitu hidup sang ibu dan hidup sang janin yang sangat erat kaitannya dengan HAM, yaitu hak untuk hidup dan memiliki keturunan yang apabila dilanggar maka akan menimbulkan kesenjangan bagi setiap manusia, karena setiap manusia memiliki hak yang sama

serta memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sebagai seorang makhluk sosial.

Dari penjabaran yang telah diuraikan bahwa dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia harus yang lebih diutamakan karena menyangkut hak untuk hidup yang pengaturannya juga terdapat pada konstitusi tertinggi negara kita yakni Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28A.

B. Ketentuan Aborsi pada Undang-undang Kesehatan Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia

Manusia memiliki hak-hak dasar untuk hidup. Hidup diartikan sebagai keadaan suatu makhluk yang karena kekuatannya Yang Maha Kuasa benda itu dapat bernafas. Berbeda dengan mesin yang hidup akibat ada perubahan bentuk energi dan bekerja tanpa adanya fungsi peredaran darah, sel-sel otak, dan bekerjanya jiwa, yang semakin lama semakin sempurna, sedangkan pada mesin terjadi tanpa kehadiran jiwa dan roh.²³

Walaupun aborsi adalah kehendak yang dengan sengaja mengugurkan bayi yang berada dalam kandungan seorang perempuan karena alasan tertentu. Aborsi dalam pandangan filsafat hukum alam yang mengagungkan nilai moralitas akan berbenturan dengan kehendak hidup seseorang yang diberikan oleh Tuhan sebagai pengendali alam semesta. Mengapa muncul tindakan aborsi yang dilakukan secara sengaja oleh seorang perempuan. Dalam pendekatan filsafat moral hukum alam maka alasan penguguran haruslah berkaitan dengan sebuah kondisi yang dapat dibenarkan secara etis untuk menghilangkan nyawa seorang (bayi). Tindakan membunuh adalah tindakan yang tidak etis secara moral, bersinggungan dengan tatanan nilai ketuhanan maupun budaya (ideologi). Ketika tindakan menghilangkan nyawa dilakukan, maka terdapat alasan-alasan etis yang dapat diajukan.²⁴

Dalam prespektif normatif maka KUHP melarang sebuah peristiwa aborsi, berdasarkan Pasal 299, 346, 348 dan 349 KUHP negara melarang abortus, termasuk

²¹ *ibid*, hlm. 142.

²² CB. Kusmaryanto, *Op. cit.*, hlm. 125.

²³ Djaja Saefullah, *Pengantar Filsafat*, PT Refika Adiana, Bandung, 2004, hlm. 199.

²⁴ Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Op. cit.* hlm 108.

menstrual regulation dan sanksi hukumannya lebih berat, bahkan hukumannya tidak hanya ditujukan kepada wanita yang bersangkutan, tapi semua orang yang terlibat kejahatan ini dapat dituntut, seperti dokter, dukun bayi, dan tukang obat, yang mengobati atau menyuruh atau yang membantu atau yang melakukan sendiri.²⁵

Sesungguhnya praktek aborsi merupakan indikator mewabahnya kejahatan moral di masyarakat sebagai buah dari sistem Kapitalisme yang diterapkan. Ideologi Kapitalisme dengan asas sekulerisme (*fashl ad-dîn 'an al-hayâh*), yaitu pemisahan aturan agama dari kehidupan. Di dalam kehidupan sehari-hari ajaran agama diabaikan, ditinggal, bahkan dicampakkan, lalu mengambil hukum aturan yang berasal dari Barat, yaitu kebebasan berekspresi atau bertingkah-laku yang telah menjadikan kehidupan sosial masyarakat menjadi rusak, karena standar kebebasan menjadi andalan mereka. Baik di pedesaan maupun di perkotaan, mereka jauh dari nilai-nilai dan ajaran agama.²⁶

Perlindungan terhadap jiwa merupakan hak yang tak bisa ditawar. Penerjemahan yang paling elementer dari hak hidup ini dituangkan dalam sistem hukum, yang salah satunya adalah hukum *Qisas*. Karena kehidupan merupakan sesuatu hal yang sangat niscaya dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun, maka barang siapa yang secara sengaja melanggar kehidupan orang dia harus dihukum setimpal supaya orang itu tidak melakukan hal yang sama ditempat lain. Di dalam Al-Qur'an dikatakan "Barangsiapa yang membunuh, melenyapkan satu jiwa, maka perbuatan itu sama nilainya melenyapkan seluruh jiwa". Jadi, satu jiwa adalah *too much*. Barang siapa menghidupi atau menjamin kehidupan satu jiwa, maka nilainya sama dengan seluruh jiwa.²⁷

Dalam konteks aborsi, maka penghilangan nyawa adalah sebuah perlawanan terhadap kehendak Tuhan atas kehilangan kehendak bebas manusia

berada dalam batas kehendak Tuhan, maka manusia yang membunuh atas seorang manusia. Budaya yang terbentuk atas kesadaran bertuhan membentuk nilai ketuhanan itu sendiri. Maka standar norma budaya akan menolak terjadinya penghilangan nyawa oleh manusia lainnya.²⁸

Karena hak asasi anak menyebutkan bahwa setiap anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapat hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa.²⁹

Ditambah lagi hukum positif Indonesia secara perlahan-lahan telah menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan tentang embrio pada ilmu kedokteran. Ketentuan dalam KUHPerduta yang masih samar-samar mengenai anak dalam kandungan sudah dapat pengesahan didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Hak Asasi Manusia menyatakan:

"Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"

Dengan demikian, jelas terlihat bahwa hukum positif Indonesia cenderung memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap hak hidup anak dalam kandungan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aborsi dalam konsep hukum berkaitan dengan nilai-nilai moralitas yang menjadikan aborsi bukan sekedar

²⁵ *ibid*, hlm. 109.

²⁶ <http://hizbut-tahrir.or.id/2016/03/17/aborsi-dalam-pandangan-islam/>, diakses, Tanggal, 22 Maret 2017.

²⁷ Mujaid Kumkelo, *et. al., Op.cit*, hlm. 48.

²⁸ *ibid*, hlm. 114.

²⁹ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016, hlm. 12.

bertentangan dengan hukum positif negara, akan tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral. Melegalkan aborsi berarti memisahkan antara hukum dan moral. Sangat berbahaya jika moral diepaskan dalam hukum positif karena hukum akan mengancam harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang berdasarkan konsep hukum alam yang menerima hukum Tuhan dan menjalankan segala hukumnya berdasarkan hukum Tuhan tersebut. Sehingga tidaklah etis bahwa kita sebagai manusia mengambil hak untuk hidup dari makhluk yang lemah seperti janin yang ada didalam kandungan Dan karenanya dalam hal legalnya aborsi dengan syarat dan ketentuan tertentu di negara kita, yaitu bahwa yang dapat melakukan aborsi adalah wanita yang kehamilannya membahayakan kesehatan tubuhnya atau dapat mengakibatkan sehingga perlu dilakukan aborsi. Aborsi bagi korban pemerkosaan juga boleh dilakukan karena alasan kemungkinan kejiwaannya akan terganggu, atau alasan lain seperti belum siap dengan kewajiban menjadi orang tua di usia dini (jika korban perkosaan adalah usia sekolah), tidak punya cukup uang untuk menghidupi calon bayi nantinya dan macam-macam alasan lainnya.

2. Oleh karena itu walaupun aborsi diperbolehkan bagi korban pemerkosaan tidak lah dibenarkan melakukan aborsi karena telah melangkahi konstitusi tertinggi dari negara kita sendiri yaitu Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28A serta Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Karena itu bagi korban pemerkosaan sepatutnya melindungi jiwa yang lebih lemah. Dan sebab kepada korban pemerkosaan agar diberikan pengertian dan nasehat bahwa melakukan aborsi itu adalah dosa besar dan aborsi adalah perbuatan yang tidak etis dan akan lebih banyak memunculkan masalah seperti trauma pasca melakukan aborsi, merasa bersalah dan gangguan sosiologis lainnya(dalam hal jika tidak terjadi indikasi medik pada korban).

A. Saran

1. Bagi korban pemerkosaan diberikan pengertian dan nasehat bahwa janin yang ada dalam kandungannya adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Menggugurkannya adalah tindakan menolak pemberiannya, tidak mensyukuri nikmat adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT dan adalah suatu dosa besar melakukan aborsi. Dan suatu saat janin tersebut akan tumbuh dewasa dan menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara dimasa depannya apabila diberikan pendidikan yang baik serta dukungan moral.
2. Perlunya kerjasama dan dukungan pemerintah dalam hal ini memberikan bantuan kepada korban pemerkosaan karena negara menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya. sehingga dapat diyakinkan kepadanya untuk tidak melakukan aborsi.
3. Perlu diharapkan dalam pergaulan sehari-hari, masyarakat untuk tidak secara langsung memusuhi wanita yang hamil diluar nikah. Karena hal ini tanpa disadari dapat menyebabkan wanita yang bersangkutan frustasi sehingga mendorong dirinya untuk melakukan tindakan aborsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman dan Soejono, 1999, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Abdussalam, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta.
- Bertens , K, 2002, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, PT.Grasindo, Jakarta.
- Chazawi,Adami, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Effendi ,H.A. Mansyur, 1993, *HAM Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Malang.

- Ekotama, Suryono, Harum Pujiarto, Widiartana, 2000, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi,, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Kumkelo, Mujaid, *et. al.*, 2015, *Fiqh HAM Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Setara Press, Malang.
- Kusmaryanto, 2002, *Kontroversi Aborsi*, PT Grasindo, Jakarta.
- Maududi, Maulana Abdul A'la, 2005, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Saefullah, Djadja, 2004, *Pengantar Filsafat*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2013, *FILSAFAT, TEORI DAN ILMU HUKUM Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, PT. RajaGrafindo, Persada, Jakarta.
- Wasitaatmadja, Fokky Fuad, 2015, *Filsafat Hukum : Akar Regionalitas Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Zaid, Moh.,2007, *Agama dan HAM Dalam Kasus di Indonesia*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi

- Erdianto Effendi, 2009, "Pengujian Perundang-undangan Hukum Pidana oleh Mahkamah Konstitusi dalam Kaitan dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia", Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. II, No. 2 November.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

D. Website

- <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/wawasan/article/download/64/46>, diakses, tanggal, 9 november 2016
- <https://almanhaj.or.id/3362-islam-dan-aborsi-satu-tinjaun-hukum-fikih.html>, diakses, Tanggal, 24 Maret 2017.
- <http://murtinitini.blog.ugm.ac.id/2011/10/26/aborsi-dan-ham/>, diakses, Tanggal, 22 Maret 2017
- <http://hizbuttahrir.or.id/2016/03/17/aborsi-dalam-pandangan-islam/>, diakses, Tanggal, 22 Maret 2017.